

MENATA KURIKULUM ILMU PEMERINTAHAN MENGUNAKAN PENDEKATAN MASYARAKAT PENGGUNA

Aos Kuswandi

*Dosen Ilmu Pemerintahan dan Sekretaris Program Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam "45" Bekasi*

Abstrak

Adanya perkembangan dalam berbagai aspek negara, pemerintahan, masyarakat dan teknologi informasi menuntut Program Studi Ilmu Pemerintahan di berbagai universitas di Indonesia untuk senantiasa peka dan merespon secara positif dalam menyempurnakan kurikulum. Program Studi Ilmu Pemerintahan harus membuat kurikulum yang relevan dengan tuntutan lapangan pekerjaan. Permasalahan dalam merevisi dan menyusun kurikulum Ilmu Pemerintahan adalah bagaimana Program Studi Ilmu Pemerintahan mampu mengakomodasi kebutuhan pihak pengguna lembaga pemerintahan, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan. Kekhasan dalam setiap program studi pada setiap universitas di Indonesia menjadikan eksistensi Program Studi Ilmu Pemerintahan semakin diakui. Oleh karenanya memberikan alternatif konsentrasi studi dan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa, merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh program studi

Kata Kunci: Kurikulum, Ilmu Pemerintahan, Masyarakat Pengguna

Pendahuluan

Dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia telah memasuki pada tahapan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama. Pada awal berdirinya Negara Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945 lebih ditujukan pada pembentukan *nation building* untuk membangun konsolidasi kebangsaan dan kesatuan karena tuntutan kondisi pembentukan Negara bangsa. Para pendiri Negara Republik Indonesia secara bahu membahu ingin membuktikan pada dunia internasional bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah ada dan eksis sebagai negara yang berdaulat. Pada masa-masa berikutnya jatuh bangun penataan kelembagaan pemerintahan Indonesia mengindikasikan pada upaya pencarian bentuk kelembagaan pemerintahan yang mendekati pada kesesuaian dengan tuntutan kebutuhan warga negara. Upaya tersebut

terus dilakukan dengan memperhatikan berbagai tuntutan, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dari masa ke masa.

Dalam konteks perkembangannya maka pemerintahan Negara Republik Indonesia merujuk pada kelembagaan pemerintahan secara struktural dan kelembagaan secara fungsional. Secara struktural maka yang dimaksudkan adalah lembaga-lembaga negara (pemerintahan) sebagai pelaksana administrasi negara di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan secara fungsional, maka yang dimaksudkan dalam administrasi negara/pemerintahan lebih ditujukan pada proses yang dijalankan atas struktur lembaga yang telah ditentukan.

Struktur dan fungsi lembaga pemerintahan selanjutnya harus berjalan secara baik dan benar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian maka menjadi penting untuk mengisi lembaga pemerintahan tersebut dengan orang-orang yang diberi kewenangan untuk menjalankannya secara profesional. Pada konteks ini, pemerintahan menjadi lebih dinamis dan memiliki daya kreatif untuk memenuhi tuntutan kebutuhan warga negara. Orang-orang yang terlibat dalam administrasi pemerintahan sebagai fungsi dari lembaga pemerintahan disebut dalam istilah sederhana sebagai pemerintah. Di sini terjadi dinamika dan terus selalu mengupayakan pada penyelenggaraan pemerintahan terbaik.

Empat konsep dalam pemerintahan yang masing-masing saling berkaitan yaitu struktur kelembagaan pemerintahan, fungsi pemerintahan dan kewenangan lembaga pemerintahan serta orang-orang yang menjalankan pemerintahan. Hal tersebut akan nampak dinamikanya dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Ini mengandung pemahaman bahwa pemerintahan merupakan suatu aktivitas yang tidak diam, selalu dinamis dan selalu mengupayakan hal yang baik.

Pengertian pemerintahan dibedakan dengan konsep politik yang cenderung ingin menguasai, adanya dominasi, selalu ingin lebih menonjol dan tidak terlalu memperdulikan pihak warga negara sebagai subyek dalam pemerintahan negara. Kita harus membedakan pemahaman kedua konsep ini karena secara pengertian masing-masing memiliki arti dan tujuan yang berbeda. Pemerintahan secara konseptual ada bertujuan untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat tanpa merugikan orang lain secara tidak sah (Van de Spiegel, 1928). Jelas bahwa

di sini Ilmu Pemerintahan memegang tujuan yang penting melalui pengembangan keilmuan secara ideal sehingga berkontribusi dalam pewujudan pemerintahan yang baik.

Pemerintahan negara itu selalu ada dalam setiap negara, walaupun masing-masing negara memiliki sistem yang berbeda dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Namun hal yang mesti menjadi catatan kita adalah, bahwa setiap pemerintahan negara dipastikan membutuhkan 'Administrasi Negara/Pemerintahan'. Di sinilah letaknya yang paling penting bagi sebuah pemerintahan negara. Administrasi pemerintahan inilah yang menyelenggarakan visi dan misi negara untuk mewujudkannya sehingga warga negara hidup sejahtera. Tentu saja administrasi pemerintahan yang baik tidak semata-mata sistemnya atau struktur kelembagaannya saja, melainkan juga perlu diisi oleh orang-orang yang profesional di bidang pemerintahan yang memiliki komitmen tinggi untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang dibebankan kepadanya.

Upaya mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik merupakan bagian dari proses untuk mencapai tujuan negara. Aparatur pemerintahan atau birokrat pemerintahan perlu dididik secara baik dan benar oleh lembaga pendidikan yang tepat di bidangnya. Dengan demikian maka diharapkan akan tercipta aparatur yang memiliki kompetensi di bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, maka perlu adanya pengisian aparatur pemerintahan yang tepat. Tuntutan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan berbagai kebijakan teknis lainnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, maka diperlukan adanya sumberdaya penyelenggara pemerintahan yang mumpuni. Untuk itu maka Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki tanggung jawab bagaimana berperan serta menciptakan aparatur pemerintahan yang baik. Karenanya secara ideal, Program Studi Ilmu Pemerintahan harus membuat suatu rancangan kurikulum yang relevan dengan tuntutan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan terutama di bidang pemerintahan.

Program Studi Ilmu Pemerintahan juga dituntut untuk mampu mensinergikan pewujudan profesionalitas aparatur penyelenggara

pemerintahan, masyarakat warga negara yang mengerti akan hak dan kewajibannya serta sektor swasta yang kondusif dan mau bermitra dengan pemerintah dalam penciptaan *good corporate governance*. Kemitraan antara Program Studi Ilmu Pemerintahan pada perguruan tinggi menjadi suatu kebutuhan dalam rangka menyiapkan rancangan kurikulum yang tepat sesuai tuntutan lapangan pekerjaan.

Aparatur penyelenggara pemerintahan yang baik, masyarakat warga negara yang memahami hak dan kewajibannya, dan sektor swasta yang bermitra menjadi bagian penting dalam sorotan pengguna sarjana ilmu pemerintahan ke depan. Pada sisi lain perubahan global dan pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadi bagian dari aspek yang memengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Masyarakat sipil menuntut pelayanan prima yang berkualitas dengan pembiayaan yang minimal serta mendukung terhadap pencapaian tujuan negara.

Adanya perkembangan dalam berbagai aspek negara, pemerintahan, masyarakat dan teknologi informasi maka menuntut Program Studi Ilmu Pemerintahan di berbagai universitas di Indonesia untuk senantiasa peka dan merespon secara positif dalam produk layanan kepada mahasiswanya.

Tuntutan Masyarakat Pengguna Lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dalam konteks luas, pemerintahan negara selalu mengkaitkan dengan konsep negara, warga negara, dan sektor swasta. Ini yang sekarang dikenal dengan istilah *governance* bukan lagi *government*. Istilah *governance* lebih mengandung pengertian sebagai penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan *government* merujuk hanya pemerintah saja. Sejatinya dalam praktik di lapangan, maka pemerintahan tidak lagi hanya dalam pengertian sempit namun menyangkut di luar diri 'pemerintah' dan 'administrasi pemerintahan' itu sendiri. Ini mengindikasikan bahwa secara praktik pemerintahan tidak hanya melulu pemerintah sebagai birokrat yang berarti pelayan saja, namun lebih dari itu. Ada tujuan ideal yang lebih luas yang harus dicapai oleh pemerintahan.

Sifat eklektik dari studi pemerintahan menjadikan dirinya tidak lagi hanya melulu berbasis konsep pemerintahan dalam arti sempit, seperti

dikemukakan oleh Bayu Suryaningrat (1980) bahwa pemerintahan tidak terbatas pada lembaga, orang-orang dan tugas pelayanan semata. Melainkan juga lebih luas dari itu, didalamnya mengandung perlindungan dan upaya mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Maka Program Studi Ilmu Pemerintahan pada setiap perguruan tinggi di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menyusun suatu rancangan ilmu pemerintahan yang bisa melingkupi kegiatan pemerintahan dalam arti luas tersebut.

Bagaimana kurikulum dibuat dan mata kuliah apa yang ditawarkan kepada calon mahasiswa menjadi agenda penting bagi Jurusan/Program Studi Ilmu Pemerintahan. Kemampuan memadukan pemenuhan kebutuhan pengembangan keilmuan pemerintahan dan tuntutan praktis pragmatis dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi suatu fokus yang perlu diperhatikan. Bahasa lain dalam hal ini dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha (2005) sebagai paradigma baru ilmu pemerintahan. Di sinilah letaknya para ilmuwan pemerintahan untuk berfikir dan berembuk merumuskan kurikulum yang memiliki cita rasa tinggi sehingga sesuai dengan tuntutan pengguna. Bagi Ndraha (2005) cita rasa tinggi bagi para ilmuwan pemerintahan akan memberikan pengembangan kreativitas sebagai seni dalam pemerintahan.

Masyarakat pengguna yang dimaksudkan adalah institusi pemerintahan, lembaga sosial politik maupun kemasyarakatan atau perusahaan yang akan menggunakan tenaga lulusan sarjana ilmu pemerintahan. Dalam perkembangan pada masyarakat pengguna maka yang cukup fenomenal sekarang adalah: Bagaimana pewujudan *Good Governance* dan *Good Corporate Governance*, yang diimbangi dengan kemampuan aparatur pemerintahan yang handal dan masyarakat sipil yang memiliki pemahaman mendalam atas aturan hukum yang ditetapkan. Dengan demikian fokus permasalahan dalam merevisi dan penyusunan kurikulum ilmu pemerintahan adalah bagaimana Program Studi Ilmu Pemerintahan mampu mengakomodasi kebutuhan pihak pengguna lembaga pemerintahan, sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan? Inilah yang harus dijawab dan menjadi tantangan besar para ilmuwan pemerintahan di program studi.

Perkembangan Paradigma Ilmu Pemerintahan Sebagai Dasar Pijakan Kurikulum

Tidak bisa dipungkiri oleh kita bahwa sampai dengan akhir abad ke-20 telah terjadi dikotomi pemahaman perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia. Pada perkembangan awalnya dipahami bahwa ilmu pemerintahan yang berkembang merupakan warisan penjajahan Belanda yang lebih bercirikan *Eropa Continental*. Ilmu Pemerintahan dipandang sebagai bagian dari perkembangan ilmu hukum, hukum tatanegara/tata pemerintahan sehingga pada awal perkembangannya lebih menekankan kepada aturan-aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara administrasi. Pemahaman yang kedua adalah ilmu pemerintahan lebih merujuk kepada *Anglo-Saxon* (Amerika Serikat). Dalam konteks pemahaman yang kedua ini ilmu pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan administrasi publik dan bahkan lebih kepada aspek pelayanan publik.

Dua perbedaan cara pandang dan pendekatan ini berimbas kepada perkembangan ilmu pemerintahan selanjutnya di Indonesia. Sehingga dengan meminjam pendapat dan analisis Ndraha (2005) maka ada istilah ilmu pemerintahan yang dikembangkan di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran dan Institut Ilmu Pemerintahan, yang masing-masing dengan kecenderungannya sendiri-sendiri sesuai dengan para ilmuwan pemerintahan di institusi tersebut. Latar belakang masing-masing ilmuwan yang menempuh studi pada berbagai perguruan tinggi di luar negeri berpengaruh terhadap pengembangan ilmu pemerintahan di Indonesia selanjutnya.

Pada awal perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia, Bayu Suryaningrat (1980) banyak merujuk pada para ahli ilmu pemerintahan atau hukum tata pemerintahan dari Belanda. Ungkapan ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan diuraikan oleh Bayu Suryaningrat (1980) dengan merujuk pada Van Poelje bahwa: "*bestuurskunde*" adalah sama dengan "*bestuurswetenschap*", lebih luas diuraikan Van Poelje dalam buku "*Algemene Inleiding tot de Bestuurskunde*" adalah sebagai "*De Bestuurskunde als toegepaste Wetenschap*" yang diterjemahkan sebagai ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang diterapkan.

Hal senada diuraikan juga oleh Mac Iver bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu pengetahuan. Lebih jelas diuraikan dalam Bayu Suryaningrat

(1980), "Jika kita berbicara tentang suatu ilmu pemerintahan kita tidak bermaksud menimbulkan keragu-raguan mengenai guna dari ilmu politik, sebagaimana pernyataan ini biasa dipergunakan. Ada suatu kumpulan pengetahuan yang sistimatis tentang negara, tentang keadaan yang menyebabkan timbulnya berbagai tipe pemerintahan, tentang hubungan antara pemerintah dan yang diperintah dalam keadaan sejarah yang berlainan, tentang cara-cara pemerintah melaksanakan fungsinya sesuai dengan jenisnya dan seterusnya. Kumpulan pengetahuan ini dapat secara tepat dinamakan ilmu pengetahuan". Konteks ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Mac Iver tersebut lebih luas dari hanya bahasan pemerintahan dalam arti sempit. Karena dalam kapasitas sebagai ilmu, ilmu pemerintahan dituntut untuk mengembangkan dirinya dengan berdasarkan pada perkembangan ilmu pemerintahan di masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang.

Merujuk pada pendapat Van Poelje, Bayu Suryaningrat (1980) memberikan analisis bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu pengetahuan, yang didalamnya juga ada ruang lingkup ilmu pemerintahan. Namun Bayu tidak menampik bahwa masih ada tumpang tindih dalam pemahaman ilmu pemerintahan dengan ilmu politik. Oleh karenanya untuk membedakan ilmu pemerintahan dengan ilmu lainnya dapat dilihat dari definisi ilmu pemerintahan itu sendiri. Pendalaman untuk memberikan keyakinan bahwa ilmu pemerintahan sebagai ilmu, Ndraha (2003) menjelaskan bahwa sebagai ilmu, maka ilmu pemerintahan terus mengembangkan dirinya dengan adanya metodologi ilmu pemerintahan sendiri. Ini yang membedakan ilmu pemerintahan dengan ilmu yang lainnya.

Seperti dikemukakan di awal dalam bagian ini, bahwa ilmu pemerintahan dapat dibedakan dengan ilmu lainnya bila kita memahaminya dari definisi ilmu pemerintahan yang dikemukakan oleh para ahli di bidang ilmu pemerintahan. Untuk hal tersebut dapat kita perhatikan beberapa pendapat ahli Bayu Suryaningrat (1980) antara lain:

1. Van Poelje

- a. "*de bestuursleer als leer van het overheids handelen*" (ajaran pemerintahan adalah sebagai ajaran tentang perbuatan pemerintahan).

- b. *“de bestuurskunde leert hoe men de openbare dienst het beste inricht en leidt”* (ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana mengatur dan memimpin sebaik-baiknya dinas umum).

2. Mac Iver

Ilmu Pemerintahan adalah ... suatu kumpulan pengetahuan yang sistematis tentang negara, tentang keadaan yang menyebabkan timbulnya tipe pemerintahan, tentang hubungan antara pemerintah, dan yang diperintah dalam keadaan sejarah yang berlainan, tentang cara-cara pemerintah melaksanakan fungsinya sesuai dengan jenisnya dan seterusnya.

3. Bayu Suryaningrat

- a. Ilmu pemerintahan mempelajari gejala-gejala pemerintahan.
- b. Ilmu pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Ilmu pemerintahan mempelajari, menganalisis, dan mengobservasi segala perbuatan pemerintah dalam menyelenggarakan tugasnya.
- d. Ilmu pemerintahan adalah ilmu pengetahuan mengenai pemerintah; ilmu ini mempelajari lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat, bentuk dan sistem pemerintahan, kegiatan pemerintah dalam mengamankan peraturan perundang-undangan, menentukan kebijaksanaan politik, dan mempelajari masalah-masalah pemerintahan.
- e. Ilmu pemerintahan mempelajari segala kebijaksanaan pemerintah, gerak dan tingkah laku pemerintah dalam rangka usahanya mencapai tujuan pemerintah.
- f. Ilmu pemerintahan berusaha memperoleh pengertian tentang asal dan bentuk kekuasaan pemerintah, pembagian dan pelaksanaan kekuasaan pemerintah.
- g. Ilmu pemerintahan mempelajari sifat, dasar, proses, dan ruang lingkup serta akibat kekuasaan pemerintah.
- h. Ilmu pemerintahan adalah sekelompok pengetahuan yang tersusun secara sistematis mengenai gejala dan fakta pemerintahan.
- i. Ilmu pemerintahan memusatkan perhatiannya kepada gerak masyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan.

- j. Ilmu pemerintahan berkaitan dengan kekuasaan dan susunan pemerintah; ilmu ini mempelajari, meneliti dan menganalisa kedua hal tersebut.
- k. Ilmu pemerintahan mempelajari fungsi pemerintah mengenai asal, proses, dasar, dan akibat dari fungsi tersebut.
- l. Ilmu pemerintahan adalah suatu cabang ilmu pengetahuan sosial yang memusatkan perhatiannya kepada fakta, gejala, dan masalah pemerintahan.
- m. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari teori dan praktik serta organisasi pemerintahan.
- n. Sebagai ilmu sosial, ilmu pemerintahan mempelajari, meneliti, dan mengamati usaha-usaha kelompok dalam masyarakat memperoleh kekuasaan pemerintahan, organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat. Hubungannya satu sama lain dan bagaimana mereka mempengaruhi masyarakat.
- o. Ilmu pemerintahan mempelajari segala macam usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat.
- p. Ilmu pemerintahan adalah studi ilmiah mengenai pemerintah dan penyelenggaraan tugasnya waktu yang lalu, sekarang dan yang akan datang.
- q. Ilmu pemerintahan mempelajari cara-cara bagaimana memberi pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, melindungi, membina, dan memajukan tingkat hidupnya.
- r. Ilmu pemerintahan mempelajari, meneliti dan mengamati serta menganalisa negara dalam keadaan bergerak.
- s. Ilmu pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan individu, keluarga, organisasi niaga, dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan, mengenai perilaku, pengawasan, dan ketaatan masyarakat dalam rangka peningkatan kemakmuran.

- t. Ilmu pemerintahan mempelajari kebijaksanaan dan politik pemerintah, perilaku partai-partai politik, hubungan dan pengaruh partai politik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
 - u. Ilmu pemerintahan adalah studi ilmiah mengenai pemerintahan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang lebih besar.
 - v. Ilmu pemerintahan mempunyai sasaran: masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama yang meliputi segala bidang yang mengandung sifat pemerintahan.
 - w. Ilmu pemerintahan bersasaran pemerintah dan administrasinya yang mencakup hubungan antara individu dengan organisasinya, antar organisasi atau lembaga masyarakat yang bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan.
 - x. Ilmu pemerintahan adalah studi ilmiah tentang pemerintahan, sejarah pemerintahan, pemerintahan sekarang dan yang akan datang.
4. A. Hoogerwerf

Menurut Hogerwerf (1983) dalam bukunya *Overheids Beleid* yang diterjemahkan sebagai Ilmu Pemerintahan, diuraikan bahwa kajian pemerintahan dianggap identik dengan kajian kebijakan publik, sehingga ilmu pemerintahan diidentikkan dengan ilmu kebijakan.

5. L.P. Van de Spiegel

Menurut Spiegel, diuraikan oleh Ndraha (2005) *Regeerskunde* atau Ilmu Pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Beberapa uraian konsep ilmu pemerintahan di atas hanya sebagian kecil saja dari pendapat para ilmuwan pemerintahan. Tentu saja definisi ilmu pemerintahan masih banyak lagi lainnya yang dikembangkan oleh ilmuwan pemerintahan Indonesia seperti Taliziduhu Ndraha, Sadu Wasistiono, Muhtar Affandi, Afan Gaffar dan lainnya. Namun apabila kita mereduksi (tanpa bermaksud menyederhanakan arti) definisi dari ilmu pemerintahan yang berkembang, maka secara objek material dari ilmu pemerintahan akan terkait dengan konsep pemerintahan negara, masyarakat warga negara dan sektor swasta. Pola hubungan antara pemerintahan negara dan warga negara maka akan dihubungkan dengan

konsep pemerintah dan yang diperintah seperti yang sering kemukakan oleh Ndraha (2005). Upaya mencapai tujuan hidup warga negara secara bersama akan diwujudkan melalui perwakilan warga negara di dalam pemerintahan. Konsep ini kemudian berkembang menjadi Pemerintah (P) dan Yang Diperintah (YD). Dalam perkembangan kekinian, banyak urusan-urusan pemerintahan tidak bisa lagi dipegang dan dikendalikan oleh pemerintah, karena alasan keterbatasan sumberdaya. Maka untuk mewujudkan dan melaksanakan urusan tersebut, peranan swasta menjadi penting dalam hal ini. Salah satu konsep yang pernah dikembangkan oleh David Osborne (1993) melalui *reinventing government* (mewirausahakan birokrasi). Dengan demikian kedudukan pemerintah, masyarakat sipil/warga negara dan swasta adalah bersifat *co-equal partner* (mitra sejajar), dalam kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut maka paradigma baru dari ilmu pemerintahan harus mampu mengakomodasi ketiganya. Ilmu yang dikembangkan tidak saja hanya pada konsep pemerintahan negara melainkan juga konsep warga masyarakat dan swasta menjadi perhatian.

Paradigma yang berkembang selama ini harus terus disempurnakan, sehingga ilmu pemerintahan mampu menempatkan jati dirinya sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki eksistensi seperti halnya ilmu-ilmu sosial lainnya. Dalam konteks ini, Ndraha (2003) telah melakukan rekonstruksi ilmu pemerintahan dengan sebutan konsep baru dengan nama *Kybernology*. Ia menguraikan bahwa untuk memudahkan dalam membedakan dan menganalisis perkembangan paradigma ilmu pemerintahan, dibagi ke dalam dua model, yaitu paradigma lama ilmu pemerintahan dan paradigma baru ilmu pemerintahan.

Meminjam dari cara pandang Ndraha, maka kita dapat menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan yang ada sekarang sudah berada pada paradigma baru ilmu pemerintahan. Pada masa ini, Kuswandi (2009) ilmu pemerintahan tidak lagi hanya memandang kajiannya pada pemerintahan, lembaga pemerintahan dan fungsi-fungsinya semata, melainkan juga sudah harus memperhatikan masyarakat warga negara dan sektor swasta. Dengan demikian maka yang berkembang (sementara ini) ilmu pemerintahan haruslah berorientasi pada *Good Governance*. Pemerintah, masyarakat dan swasta, sama-sama menjadi bagian yang perlu dikaji untuk mengembangkan ilmu pemerintahan.

Pengembangan Kurikulum yang Responsif Terhadap Tuntutan Pengguna

Seperti dikemukakan terdahulu bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang memfokuskan dirinya pada pengkajian gejala-gejala pemerintahan, dan merupakan bagian dari ilmu sosial, maka pengembangannya tidak akan lepas dari hal tersebut. Pada sisi lain paradigma ilmu pemerintahan telah mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintahan dalam negeri maupun hubungan pemerintahan antar negara. Hal yang harus menjadi perhatian adalah adanya perubahan global dimana komunikasi dan hubungan antar manusia, antar organisasi dan antar bangsa sudah tanpa batas disertai adanya perkembangan teknologi informasi, maka akan mempengaruhi juga terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kondisi faktual baik secara praksis penyelenggaraan pemerintahan maupun secara konsep ideal ilmu pemerintahan, maka ilmu pemerintahan ke depan harus dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut. Ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang eklektik, harus mampu memadukan berbagai cabang ilmu lainnya yang ada relevansinya bagi pengembangan ilmu pemerintahan. Dapat kita ambil contoh misalnya dengan munculnya *reinventing government* dari Osborne (1993) ini cukup memengaruhi dalam tataran praktik pemerintahan di Indonesia. Adanya konsep *E-government* yang dipergunakan dalam membantu efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (contohnya: Kabupaten Sragen, Jembrana, Yogyakarta, Pare-pare dll), ini juga memberikan inspirasi bagi pengembangan ilmu pemerintahan. Belum lagi dengan adanya konsep pasar bebas, dimana perusahaan asing sudah boleh berkiprah di Indonesia, serta banyak pula *non government organization* (NGO), maka inipun menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kurikulum ilmu pemerintahan.

Penutup

Berbicara kajian keilmuan bidang pemerintahan senantiasa menarik dari masa ke masa, karena pemerintahan merupakan suatu bentuk yang dinamis, yang selalu mencari bentuk menjadi lebih baik. Perjuangan untuk

mewujudkan ilmu pemerintahan semakin memiliki eksistensi diri sebagai ilmu adalah tanggung jawab semua pihak yang terkait dengan ilmu pemerintahan. Dalam hal ini dalam banyak kalangan yang menggeluti bidang ilmu pemerintahan menyebutkannya 'Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia' (MIPI), harus terus berusaha secara konsisten dengan komitmen yang tinggi untuk pengembangan ilmu pemerintahan.

Mengkaji kembali ilmu pemerintahan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai faktor eksternal dari diri ilmu pemerintahan yang ada selama ini merupakan langkah dan proses yang bijaksana. Dengan demikian merevisi kurikulum sebagai tuntutan dari perkembangan ilmu pemerintahan itu sendiri dan praktik penyelenggaraan pemerintahan adalah hal yang perlu terus dilakukan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan. Kekhasan dalam setiap program studi pada setiap universitas di Indonesia menjadikan eksistensi Program Studi Ilmu Pemerintahan semakin diakui. Oleh karenanya memberikan alternatif konsentrasi studi dan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa, merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh program studi.

Beberapa usulan mata kuliah yang akan menjadi bagian dari pengembangan kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan dan beberapa catatan sebagai dasar pertimbangan perumusan penyempurnaan kurikulum di Program Studi Ilmu Pemerintahan yaitu:

- a. Perlu ditinjau kembali konsistensi antara visi, misi, tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pemerintahan. Tentu saja hal ini terkait dengan usulan perubahan kurikulum ke depan.
- b. Dalam merevisi kurikulum yang diwujudkan dalam bentuk mata kuliah, maka perlu memperhatikan perkembangan paradigma baru ilmu pemerintahan dengan memberikan perhatian kepada pemerintahan (pemerintah), masyarakat warga negara (yang diperintah) dan swasta sebagai mitra pemerintah sebagai bagian dari objek kajian. Dengan demikian, upaya kontribusi ilmu pemerintahan dalam praktik-praktik pemerintahan akan terasa terutama dalam mewujudkan *good governance*.
- c. Kebijakan otonomi daerah dan pembangunan wilayah menjadi bagian yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kepekaan mahasiswa dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang baik. Dalam

konteks ini maka keberadaan Program Studi Ilmu Pemerintahan lebih bermakna bagi pemerintahan daerah di Indonesia.

- d. Konsep kesetaraan gender merupakan issue yang berkembang dalam tataran kebijakan politik dan pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian perlu adanya perhatian dari program studi untuk memunculkan mata kuliah yang responsif terhadap kebijakan tersebut.
- e. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian yang perlu dikembangkan sebagai kekhasan Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan pengembangan yang lebih aplikatif sesuai dengan tuntutan dan perkembangan ilmu pemerintahan dan praktik-praktik pemerintahan.

Berdasarkan beberapa catatan tersebut, beberapa mata kuliah yang bisa diusulkan untuk pengembangan kurikulum di Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam mendisain usulan revisi mata kuliah dalam penyusunan kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan di luar mata kuliah yang telah ditetapkan secara nasional dalam konsorsium ilmu pemerintahan, maka mata kuliah ini bisa dimasukkan ke dalam mata kuliah keahlian (konsentrasi) atau mata kuliah pilihan. Beberapa mata kuliah yang diusulkan dan dapat dipertimbangkan, yaitu:

- a. Konsentrasi Otonomi Daerah dan Pembangunan Wilayah:
 1. Analisis Kebijakan Otonomi Daerah,
 2. Perencanaan Pembangunan Wilayah Kabupaten dan Kota,
 3. *Community Development* (Pemberdayaan Masyarakat),
 4. Manajemen Pemerintahan Daerah.
- b. Konsentrasi Manajemen Pelayanan Publik:
 1. *e-Government* dalam Pelayanan Publik,
 2. *Public Relation* dan Negosiasi,
 3. *Disaster Management* (Manajemen Bencana),
 4. Manajemen Pelayanan Publik.
- c. Konsentrasi Manajemen SDM Pemerintahan:
 1. Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan,

2. Perencanaan dan Pengelolaan Sumberdaya Manusia dalam Pemerintahan,
 3. Masalah-masalah Ketenagakerjaan,
 4. Manajemen Konflik dalam Pemerintahan.
- d. Konsentrasi Manajemen Keuangan:
1. Teori dan Praktik Pengambilan Keputusan,
 2. Akuntansi Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah,
 3. Sistem Pengawasan dan Audit Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan,
 4. Manajemen Strategi Peggalian Potensi Keuangan Daerah.

Untuk penguatan dalam menempuh konsentrasi studi (mata kuliah pilihan) sebaiknya mahasiswa diberikan bekal tambahan perkuliahan mata kuliah yang mendukung terhadap penguasaan ilmu pemerintahan praksis kekinian. Beberapa mata kuliah berikut dapat dijadikan sebagai alternative penguatan keashlian mahasiswa yaitu:

1. *Good Governance* dalam Pemerintahan Indonesia,
2. Praktikum Lapangan Bidang Pemerintahan,
3. Analisis Politik Lokal, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah,
4. Kajian Politik Pemerintahan dan Kebijakan Gender dalam Pembangunan,
5. Masalah-masalah Keuangan Negara dan Sektor Publik.

Sumber Kepustakaan

Hoogerwerf, A., 1985, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Erlangga

Kuswandi, Aos, 2009, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bekasi: Lembaga Penerbitan Pascasarjana Universitas Islam '45' (UNISMA).

Ndraha, Taliziduhu, 2005, *Kybernology Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

_____, 2005, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

_____, 2003, *Kybernology*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Osborne, D. dan Gaebler, T. 1993, *Reinventing Government*, New York: Penguin Group.

Suryaningrat, Bayu, 1980. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Aksara Baru.